



RENJA

PERUBAHAN BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Karena atas perkenan-Nya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tahun 2024 dapat disusun dengan baik.

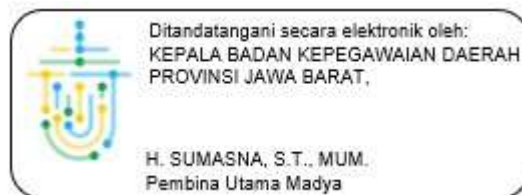
Rencana Kerja (Renja) merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Dearah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Secara Substansi, Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 memuat hasil evaluasi Renja Triwulan II Tahun 2024, tujuan dan sasaran BKD Tahun 2024 serta rencana kerja dan pendanaan BKD tahun 2024.

Kami Ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan dokumen Renja Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, Semoga Allah SWT meridhoi kita semua.

Bandung, 1 Agustus 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II. EVALUASI RENJA BKD PROV JABAR TW II TAHUN 2024	7
2.1. Evaluasi RENJA BKD Prov Jabar sampai dengan TW II Tahun 2024	7
2.2. Analisis Kinerja Layanan BKD Prov Jabar.	13
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD	11
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.	14
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.	29
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH BKD PROV JABAR	30
3.1 Program dan Kegiatan BKD Prov Jabar Tahun 2024	30
3.2 Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BKD Prov Jabar Tahun 2024	41
BAB IV. PENUTUP	22
Lampiran-Lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun, yang memuat program kegiatan, sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, penyusunan berpedoman kepada perubahan sasaran dan tujuan yang di monitoring dan evaluasi setiap triwulannya, dan berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat.

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib Menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang dalam pasal 15 ayat (1) mengamatkan bahwa “Perangkat Daerah Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah”

Proses Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai Pada Tahun berjalan hasil Monitoring Evaluasi Pada Triwulan I dan II Tahun 2024, selain itu fenomena yang ada, serta isu strategis yang dihadapi pada tahun berjalan.

Rencana Kerja BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 telah diselaraskan dengan dokumen Renstra BKD Tahun 2024-2026 yang telah dirubah pada Tahun 2024 dan akan dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan BKD Provinsi Jawa Barat tahun 2024 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran pembanguna dan penelahaan terhadap Kebijakan Nasional.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Renstra BKD Provinsi Jawa Barat 2018-2023 Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Undang-undang No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang

- Hasil Verifikasi dan Validasi, dan Inventarisasi Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237);
 18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 78 Seri E);
 19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat;
 20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
 21. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2026;
 22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.
 23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD Provinsi Jawa Barat);
 24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD Provinsi Jawa Barat);

25. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor Kep.613/PR.03/Sekre/2023 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024-2026.
26. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor Kep.709/PR.03/Sekre/2024 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 disusun untuk mewujudkan target kinerja Tahun 2024 dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki.

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah ke dalam Rencana Aksi Tahunan;
- Menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan dan tugas Badan Kepegawaian.

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini dijabarkan penjelasan ringkas tentang RENJA Perangkat Daerah, keterkaitan antara RENJA dengan RKPD serta RENSTRA perangkat daerah, serta proses penyusunan RENJA Perubahan.

BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT II TAHUN 2024

Bab ini berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKD Provinsi Jawa Barat TW II Tahun 2024 dan Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2023, analisis kinerja

pelayanan BKD Provinsi Jawa Barat, dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKD Provinsi Jawa Barat.

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini memuat rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Perubahan BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

BAB IV : PENUTUP

Bab ini uraian penutup yang terdiri atas catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024

Evaluasi atau reviu Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dilakukan terhadap realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan BKD Provinsi Jawa Barat. Serta realisasi pada Triwulan II Tahun 2024 yang dapat di lihat pada Tabel Capaian Kinerja 2.2.

Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 di selaraskan dengan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024-2026 dan Cascading Renja Perubahan Tahun 2024.

2.1 Evaluasi Rencana Kerja BKD Provinsi Jawa Barat (s.d Triwulan II Tahun 2024).

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Triwulan II Tahun 2024 telah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) secara optimal dan terukur dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah di tetapkan. Pada Tahun 2024, BKD Provinsi Jawa Barat mempunyai 2 (dua) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan dengan alokasi anggaran menjadi Rp.79.309.868.935,- sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat 2024.

Hasil evaluasi terhadap capaian pelaksanaan Program Kepegawaian dan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sampai dengan Triwulan II tahun 2024 telah mencapai realisasi anggaran 34.706.284.708 dengan persentase 42,63 % dari pagu anggaran perubahan sebesar Rp.81,413,500,362,- dengan sisa Anggaran Rp.46.707.215.654,- dengan realisasi Fisik adalah 38,63 %, Adapun rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program sehingga predikat kinerja yang dicapai untuk Tahun 2024 adalah “Sangat Rendah”.

No	Kode	Uraian/Detail Uraian Penjabaran Daerah dan Program/Kegiatan/Sub-kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan/Sub-kegiatan	Target Rencana-Perangkit Daerah pada tahun 2024 (Misi periode Rencana PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana-Perangkit Daerah Provinsi sampai dengan Rencana Perangkit Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Biaya Perangkit Daerah Provinsi Tahun Anggaran (Tahun 2024) yang diawakali		Rencana Kinerja PMA Tahun 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Biaya Perangkit Daerah Provinsi yang diawakali		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Biaya PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Biaya Perangkit Daerah Provinsi 1/4 Tahun 2024 (Misi Tahun Pelaksanaan Rencana Perangkit Daerah Provinsi Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Biaya Perangkit Daerah Provinsi 1/4 Tahun 2024 (%)		Grafik Perangkit Daerah Perangkit Daerah	Keterangan							
				Berkas	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24							
Rata-Rata Capaian Kinerja Register (%)																30,00	28,27			0,00	0,00									
Predikat Kinerja																SB	SB			SB	SB									
1.00.01.1.01	Mula dan Promosi ASN	Misi 1/4 Misi Perencanaan dan Mula		PDN/Rp	1.427.766.040	Rp	2.128.295.639	40	Rp	1.427.766.040	0	Rp	888.655.500	40	Rp	282.625.000	Rp	-	Rp	-	40	Rp	572.270.500	100,00	85,34	Rp	28.826.261	0,00	0,00	Bulan-Perangkit Daerah
1.01.01.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi (jabatan, Promosi, Tangg, jabatan, Adwasa, ke, jabatan, Pakaian dan Mutasi ASN Antar Daerah)	DOKUMEN	Rp	602.967.291	Rp	-	1	Rp	602.967.291	0	Rp	85.782.000	0	Rp	112.911.500	Rp	-	Rp	-	0	Rp	208.492.500	0,00	89,27	Rp	2.086.420	0,00	0,00	Bulan-Perangkit Daerah
1.01.01.1.02.0002	Pengelolaan Penilaian Pengangkatan ASN	Jumlah Pengangkatan Penilaian Pengangkatan ASN	LAPORAN	Rp	492.256.355	Rp	-	6	Rp	492.256.355	1	Rp	126.687.000	6	Rp	21.157.000	Rp	-	Rp	-	6	Rp	218.844.000	50,00	44,04	Rp	2.228.440	0,00	0,00	Bulan-Perangkit Daerah
1.01.01.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Promosi ASN	DOKUMEN	Rp	605.423.396	Rp	-	6	Rp	605.423.396	0	Rp	87.087.500	0	Rp	58.546.500	Rp	-	Rp	-	0	Rp	143.734.000	95,00	21,74	Rp	1.437.340	0,00	0,00	Bulan-Perangkit Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja Register (%)																35,33	35,89			0,00	0,00									
Predikat Kinerja																SB	SB			SB	SB									
1.05.01.1.01	Pengembangan Kompetensi ASN	Misi 1/4 Misi Pengembangan Karier		PDN/Rp	3.447.876.228	Rp	5.915.584.521	120	Rp	3.447.876.228	0	Rp	142.465.586	120	Rp	284.986.753	Rp	-	Rp	-	120	Rp	727.552.318	100,00	13,35	Rp	46.577.768	0,00	0,01	Bulan-Perangkit Daerah
1.02.01.1.03.0001	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Assessment Center	DOKUMEN	Rp	114.153.600	Rp	-	11	Rp	114.153.600	2	Rp	12.024.000	2	Rp	32.997.125	Rp	-	Rp	-	0	Rp	40.021.125	41,41	8,21	Rp	910.811	0,00	0,00	Bulan-Perangkit Daerah
1.01.01.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lulusan ASN yang Berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lulusan ASN yang Berkualitas	DOKUMEN	Rp	2.715.166.200	Rp	-	4	Rp	2.715.166.200	0	Rp	18.866.000	1	Rp	315.383.357	Rp	-	Rp	-	1	Rp	334.296.151	25,00	12,73	Rp	3.343.908	0,00	0,00	Bulan-Perangkit Daerah
1.01.01.1.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan DMOT	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan DMOT	DOKUMEN	Rp	244.842.000	Rp	-	4	Rp	244.842.000	0	Rp	-	1	Rp	1.920.000	Rp	-	Rp	-	1	Rp	1.920.000	33,00	1,62	Rp	36.708	0,00	0,00	Bulan-Perangkit Daerah
1.01.01.1.03.0006	Fasilitas Serifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Serifikasi Jabatan ASN	DRANG	Rp	161.318.000	Rp	-	100	Rp	161.318.000	0	Rp	-	0	Rp	1.617.500	Rp	-	Rp	-	0	Rp	1.617.500	0,00	1,62	Rp	26.270	0,00	0,00	Bulan-Perangkit Daerah
1.01.01.1.03.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan DMOT Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan DMOT Jabatan Fungsional	DOKUMEN	Rp	478.357.800	Rp	-	6	Rp	478.357.800	2	Rp	76.738.000	1	Rp	77.158.000	Rp	-	Rp	-	0	Rp	147.938.000	30,00	31,20	Rp	1.479.280	0,00	0,00	Bulan-Perangkit Daerah
1.01.01.1.03.0010	Fasilitas Serifikasi Pungutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Serifikasi Pungutan ASN	DRANG	Rp	460.921.600	Rp	-	10	Rp	460.921.600	0	Rp	7.811.000	0	Rp	1.817.500	Rp	-	Rp	-	0	Rp	28.428.500	0,00	2,24	Rp	304.281	0,00	0,00	Bulan-Perangkit Daerah
1.01.01.1.03.0013	Penilaian dan Pemberian Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Penilaian dan Pemberian Informasi Jabatan Fungsional ASN	LAPORAN	Rp	132.344.837	Rp	-	2	Rp	132.344.837	0	Rp	182.750	1	Rp	18.071.000	Rp	-	Rp	-	1	Rp	21.553.750	50,00	6,73	Rp	315.528	0,00	0,00	Bulan-Perangkit Daerah
1.01.01.1.03.0014	Penilaian Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional ASN	DRANG	Rp	137.393.406	Rp	-	30000	Rp	137.393.406	1283	Rp	-	30000	Rp	3.645.000	Rp	-	Rp	-	12833	Rp	3.645.000	31,12	3,46	Rp	36.438	0,00	0,00	Bulan-Perangkit Daerah
1.01.01.1.03.0014	Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional ASN	DOKUMEN	Rp	480.961.840	Rp	-	6	Rp	480.961.840	0	Rp	21.876.836	1	Rp	126.467.120	Rp	-	Rp	-	0	Rp	267.338.000	50,00	34,47	Rp	1.671.661	0,00	0,00	Bulan-Perangkit Daerah
1.01.01.1.03.0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	LAPORAN	Rp	61.938.265	Rp	-	2	Rp	61.938.265	0	Rp	-	1	Rp	-	Rp	-	Rp	-	1	Rp	-	50,00	0,00	Rp	-	0,00	0,00	Bulan-Perangkit Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja Register (%)																34,67	35,29			0,00	0,00									

No	Kode	Uraian/Isi Matrik Penerimaan Daerah dan Program/Regulasi /Sub Regulasi	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Regulasi/Isi Matrik	Target Kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 (Materi Perincian Rencana PI Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah Provinsi tahun berjalan dengan Rencana Perangkat Daerah tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Biaya Perangkat Daerah Provinsi Tahun Anggaran (Tahun 2024) yang diawalkan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Biaya Perangkat Daerah Provinsi yang diawalkan		Realisasi Kinerja dan Anggaran Biaya Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2024 (Materi Tahun Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Biaya Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Pemanggung Jawab	Keterangan		
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	I		II		III		IV		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			Kinerja	Rp.
										Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.												
										Predikat Kinerja		SA	SA					SA	SA										
5.83.02.1.01		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Nilai Kriteria Manajemen Kinerja dan Peningkatan, Peningkatan dan Disiplin	PUN	Rp. 2.287.218.951	Rp. 2.282.120.712	128	Rp. 2.287.218.951	0	Rp. 184.499.488	120	Rp. 185.799.423	Rp.	-	Rp.	-	128	Rp. 488.229.823	100,00	10,28	Rp.	26.623.869	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah				
5.83.02.1.01.0150		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	DO/LM/MS	Rp. 718.174.932	Rp.	-	8	Rp. 718.174.000	8	Rp. 87.024.083	0	Rp. 88.214.189	Rp.	-	Rp.	-	8	Rp. 123.180.000	71,28	14,27	Rp.	1.231.400	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah			
5.83.02.1.01.0004		Pengembangan Pambinaan Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah KAM yang Diberikan Penghargaan	ORANG	Rp. 1.194.731.804	Rp.	-	13	Rp. 1.194.782.884	0	Rp. 88.780.100	0	Rp. 113.819.703	Rp.	-	Rp.	-	0	Rp. 183.245.000	0,00	17,01	Rp.	3.031.414	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah			
5.83.02.1.01.0100		Pengembangan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah KAM yang Diberikan Tanda Jasa	ORANG	Rp. 90.504.884	Rp.	-	300	Rp. 98.084.884	1	Rp. 3.471.800	0	Rp. 17.386.200	Rp.	-	Rp.	-	1	Rp. 20.977.800	0,20	21,21	Rp.	208.778	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah			
5.83.02.1.01.0007		Pemberian Disiplin ASN	Jumlah KAM yang Merupakan Pemberian Disiplin	ORANG	Rp. 383.848.918	Rp.	-	300	Rp. 302.889.000	111	Rp. 38.127.000	126	Rp. 71.512.115	Rp.	-	Rp.	-	1247	Rp. 38.620.215	200,40	33,98	Rp.	896.292	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah			
5.83.02.1.01.0008		Pelaksanaan Proses Lain Penerimaan Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Lain Penerimaan Pegawai yang Dilayani	DO/LM/MS	Rp. 32.627.262	Rp.	-	19	Rp. 32.627.262	2	Rp. 3.948.300	0	Rp. 7.088.000	Rp.	-	Rp.	-	0	Rp. 13.036.000	80,00	18,98	Rp.	110.361	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah			
										Rata-Rata Capaian Kinerja Regulasi (%)		71,82	21,47					0,00	0,00										
										Predikat Kinerja		SA	SA					SA	SA										
										Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)		41,71	22,94					0,00	0,00										
										Predikat Kinerja		SA	SA					SA	SA										
5.83.02		PROGRAM PENUNJANG LUSURAN PEMBERANTAHAN DAN BAHAN REKREASI	Indeks Reflektansi Binokas Perangkat Daerah Nilai SIMIP Perangkat Daerah	KATIGOR	Rp. 68.783.811.127	Rp. 68.021.828.883	84	Rp. 60.791.811.127	0	Rp. 13.839.682.972	0	Rp. 31.480.628.223	Rp.	-	Rp.	-	0	Rp. 30.820.328.194	0,00	50,27	Rp.	881.860.519	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah				
5.83.02.1.01		Pemenuhan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase dokumen perencanaan dan pelaksanaan yang disusun	PERSEN	Rp. 530.291.400	Rp. 521.941.138	100	Rp. 550.391.400	100	Rp. 131.413.204	990	Rp. 35.882.827	Rp.	-	Rp.	-	100	Rp. 288.475.911	100,00	52,43	Rp.	9.100.371	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah				
5.83.02.1.01.0101		Pemenuhan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DO/LM/MS	Rp. 101.917.208	Rp.	-	14	Rp. 613.917.200	1	Rp. 210.412.088	1	Rp. 38.087.217	Rp.	-	Rp.	-	1	Rp. 170.889.121	80,20	61,08	Rp.	2.708.864	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah			
5.83.02.1.01.0100		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	LAPORAN	Rp. 134.234.200	Rp.	-	4	Rp. 134.334.100	1	Rp.	-	1	Rp.	-	1	Rp.	17.776.800	80,00	11,31	Rp.	177.368	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah				
										Rata-Rata Capaian Kinerja Regulasi (%)		80,00	83,18					0,00	0,00										
										Predikat Kinerja		SA	SA					SA	SA										
5.83.02.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan keuangan perangkat daerah yang disusun	PERSEN	Rp. 44.712.208.703	Rp. 41.888.905.948	100	Rp. 44.712.208.703	100	Rp. 11.634.931.478	100	Rp. 12.968.146.917	Rp.	-	Rp.	-	100	Rp. 24.581.279.790	100,00	54,98	Rp.	644.811.851	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah				
5.83.02.1.02.0001		Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ORANG/BLANJA	Rp. 44.490.678.278	Rp.	-	140	Rp. 44.490.678.278	138	Rp. 11.816.480.278	137	Rp. 11.707.789.317	Rp.	-	Rp.	-	Rp.	24.434.188.671	54,81		Rp.	144.242.887	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah			

No	Kode	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Register	Indikator Kinerja Program (Subsistem/ Kegiatan/ Sub-aid)	Target Rencana Perangkat Daerah pada tahun 2024 (akhir periode Rencana 50 Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan akhir Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang direvisasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Provinsi yang direvisasi		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana 50 Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Provinsi 1/9 Tahun 2024 (akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2024)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana 50 Tahun 2024 (%)		Sifat Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan											
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			Kinerja	Rp.									
																												I	II	III	IV	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.03.01.1.03.0001		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran/ Tahunan/ Laporan Tahunan/ Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ Tahunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ Tahunan/ Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ Tahunan	LAPORAN	Rp.	210.330.420	Rp.	-	21	Rp.	210.330.420	3	Rp.	8.444.100	3	Rp.	160.547.000	Rp.	-	Rp.	-	Rp.	-	Rp.	-	1	Rp.	160.990.100	40,00	78,04	Rp.	1.683.911	0,00	0,01	Badan Penyelenggara Daerah	
Rata-Rata Capaian Kinerja Register (%)																	20,00	86,48			0,00	0,01														
Prediksi Kinerja																	38	3			38	38														
1.03.01.1.03		Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah	Pemantauan pelayanan administrasi dan pengawasan dan keterbukaan informasi publik Perangkat Daerah yang diabdikan	PIRSAN	Rp.	297.760.000	Rp.	-	100	Rp.	297.760.000	100	Rp.	-	100	Rp.	-	Rp.	-	Rp.	-	Rp.	-	Rp.	-	100	Rp.	-	100,00	0,00	Rp.	-	0,00	0,00	Badan Penyelenggara Daerah	
1.03.01.1.03.0001		Pengadilan Paksaan Dinas Berbasis Aplikasi Berkeadilan	Jumlah Paksa Paksaan Dinas Berbasis Aplikasi Berkeadilan	PAKET	Rp.	80.800.000	Rp.	-	100	Rp.	80.800.000	0	Rp.	-	0	Rp.	-	Rp.	-	Rp.	-	Rp.	-	Rp.	-	0	Rp.	-	0,00	0,00	Rp.	-	0,00	0,00	Badan Penyelenggara Daerah	
1.03.01.1.03.0003		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	ORANG	Rp.	100.000.000	Rp.	-	20	Rp.	100.000.000	0	Rp.	-	0	Rp.	-	Rp.	-	Rp.	-	Rp.	-	Rp.	-	0	Rp.	-	0,00	0,00	Rp.	-	0,00	0,00	Badan Penyelenggara Daerah	
Rata-Rata Capaian Kinerja Register (%)																	0,00	0,00			0,00	0,00														
Prediksi Kinerja																	38	38			38	38														
1.03.01.1.06		Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Pemantauan pelayanan administrasi umum perangkat Daerah yang diabdikan	PIRSAN	Rp.	2.621.090.430	Rp.	2.060.881.389	100	Rp.	2.621.090.430	100	Rp.	261.681.014	100	Rp.	422.072.911	Rp.	-	Rp.	-	Rp.	-	Rp.	-	100	Rp.	683.133.925	100,00	26,08	Rp.	27.495.382	0,00	0,01	Badan Penyelenggara Daerah	
1.03.01.1.06.0001		Pengadaan Peralatan dan Penghapusan Kotor	Jumlah Paket Pengadaan dan Penghapusan Kotor yang Diabdikan	PAKET	Rp.	482.179.425	Rp.	-	20	Rp.	482.179.425	0	Rp.	82.683.330	0	Rp.	109.017.731	Rp.	-	Rp.	-	Rp.	-	Rp.	-	12	Rp.	182.342.082	60,00	39,60	Rp.	1.921.411	0,00	0,00	Badan Penyelenggara Daerah	
1.03.01.1.06.0003		Pemeliharaan Barang Cetak dan Penggantian yang Diabdikan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggantian yang Diabdikan	PAKET	Rp.	225.261.081	Rp.	-	21	Rp.	225.261.081	3	Rp.	40.945.000	3	Rp.	48.181.081	Rp.	-	Rp.	-	Rp.	-	Rp.	-	4	Rp.	98.075.580	50,00	40,88	Rp.	980.750	0,00	0,00	Badan Penyelenggara Daerah	
1.03.01.1.06.0008		Audits Kelengkapan Tera	Jumlah Laporan Realisasi Kelengkapan Tera	LAPORAN	Rp.	123.000.000	Rp.	-	11	Rp.	123.000.000	1	Rp.	23.195.000	1	Rp.	35.750.000	Rp.	-	Rp.	-	Rp.	-	Rp.	-	4	Rp.	59.070.000	50,00	48,00	Rp.	198.500	0,00	0,00	Badan Penyelenggara Daerah	
1.03.01.1.06.0009		Pengelolaan Rapor Kinerja dan Kualitas (SKP)	Jumlah Laporan Pengungkapan Rapor Kinerja dan Kualitas (SKP)	LAPORAN	Rp.	1.780.880.014	Rp.	-	11	Rp.	1.780.880.014	0	Rp.	107.927.888	0	Rp.	227.534.574	Rp.	-	Rp.	-	Rp.	-	Rp.	-	4	Rp.	235.862.543	60,00	12,84	Rp.	2.024.023	0,00	0,00	Badan Penyelenggara Daerah	
Rata-Rata Capaian Kinerja Register (%)																	51,00	36,91			0,00	0,00														
Prediksi Kinerja																	8	38			38	38														
1.03.01.1.07		Pengadaan Barang Modal Daerah Pemeringkat Urusan Pemerintahan Daerah	Pemantauan barang modal daerah pemeringkat urusan pemerintahan daerah yang diabdikan	PIRSAN	Rp.	1.681.660.370	Rp.	1.780.739.778	100	Rp.	1.681.660.370	100	Rp.	119.456.000	100	Rp.	477.780.000	Rp.	-	Rp.	-	Rp.	-	Rp.	-	100	Rp.	537.185.000	100,00	35,21	Rp.	23.050.048	0,00	0,00	Badan Penyelenggara Daerah	
1.03.01.1.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemukiman Gedung Rumah atau Bangunan Lain-lain	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pemukiman Gedung Rumah atau Bangunan Lain-lain yang Diabdikan	UNIT	Rp.	1.081.860.370	Rp.	-	1	Rp.	1.081.860.370	0	Rp.	119.456.000	0	Rp.	477.780.000	Rp.	-	Rp.	-	Rp.	-	Rp.	-	0	Rp.	987.140.000	0,00	10,21	Rp.	1.971.480	0,00	0,01	Badan Penyelenggara Daerah	
Rata-Rata Capaian Kinerja Register (%)																	0,00	38,21			0,00	0,01														
Prediksi Kinerja																	38	8			38	38														

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 berkinerja sangat rendah terdapat faktor hambatan dan isu pencapaian kinerja, yaitu sebagai berikut :

1. Kegiatan BKD adalah kegiatan yang merupakan lanjutan dari program/kegiatan tahun sebelumnya, sehingga kendala yang akan dihadapi tidak akan terlalu berarti.
2. Menunggu jadwal diklat/ pembinaan dari Pembina jabatan Fungsional yang tidak selaras dengan jadwal oleh bkd buat, dan perlu disesuaikan.
3. Penetapan indikator kinerja sub kegiatan yang kurang tepat sehingga kinerja menjadi sulit terukur secara jelas.
4. Terdapat keterlambatan SPJ karena belum lengkapnya dokumen pendukung SPJ.
5. Adanya perubahan regulasi dan kebijakan pimpinan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi Perubahan Rencana Kerja (RENJA) BKD Provinsi Jawa Barat Triwulan II tahun 2024, Pencapaian Program dan Kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 di peroleh sebesar 42,63 %, Dengan kategori Sangat Rendah Sehingga menjadi perhatian untuk di lakukan perbaikan kedepan dalam meningkatkan Kinerja.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BKD Tahun 2024

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dengan Bappeda serta Bidang di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Semester II Tahun 2024, adanya perubahan Target serta Indikator pada di lihat pada Tabel di bawah ini :

TABEL 2.2
Perubahan Indikator Kinerja
Tahun 2024

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan Target		Alasan Perubahan	Bidang
				Semula	Menjadi		
1	Kepegawaian	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi pegawai	15 Orang	9 Orang	Secara Ketentuan Kemenpan bahwa pemenang disesuaikan dengan 3 kategori dan terdapat 3 pemenang	PKAP
2	Kepegawaian	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8 Dok	5 Dok	Dilakukan 5 kali kegiatan pada tahun 2024 adanya efisiensi	PKAP
3	Kepegawaian	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengelolaan Tanda jasa bagi pegawai	500 Orang	100 %	Pengelolaan tanda jasa dilakukan pada seluruh pegawai	PKAP
4	Kepegawaian	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pembinaan Disiplin ASN	500 Orang	45977 Orang	Pembinaan Orang disesuaikan dengan jumlah asn di pemprov jabar	PKAP
5	Kepegawaian	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	10 Dokumen	11 Dokumen	Setiap bulan selalu ada yang di layani	PKAP

2.3 Analisis Kinerja Layanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, memiliki tugas, pokok dan fungsi melaksanakan fungsi penunjang urusan kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, meliputi :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
2. Penyelenggaraan perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
3. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan serta pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis badan;
4. Penyelenggaraan administrasi Badan;
5. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
6. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kinerja pelayanan Urusan Kepegawaian oleh Badan Kepegawaian Daerah Daerah Provinsi Jawa Barat pada periode sebelumnya (tahun 2018-2023) ditetapkan dengan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama dalam Perencanaan Strategis BKD periode Tahun 2024-2026 mengalami beberapa kali perubahan karena target kinerja indikator telah tercapai dan perlu reviu untuk menentukan kembali indikator kerjanya. Capaian kinerja selama periode 2019-2024 tersaji dalam tabel berikut ini :

**Tabel. 2.3 Pencapaian Kinerja Layanan
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Analisis Catatan
				2019	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indeks Sistem Merit	-	-	294	325	375,5	380.5	396,5	396,5	396,5	397,5	400	-
2	Indeks Profesionalitas ASN	-	-	-	-	-	-	-	-	54,25	44,99	45,99	-

3.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat apabila di sandingkan dengan capaian yang telah di targetkan baik program, dan kegiatan BKD telah mencapai target yang telah di tetapkan. Walaupun masih adanya kekurang cermattan perencanaan saat menentukan kegiatan yang akan dilakukan baik secara waktu kegiatan maupun perhitungan saat menganggarkan.hal ini terjadi karena tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan pedoman penyusunan Renja.

Permasalahan dan hambatan yang di hadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BKD, yaitu antara lain :

Gambar 2.4
Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Isu Strategis



Isu dan masalah strategis yang menjadi perhatian utama pada tahun 2025 merupakan hasil dari evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan tugas pokok fungsi Badan Kepegawaian Daerah serta permasalahan yang timbul pada tahun-tahun sebelumnya.

Gambar 2.5
Tantangan Pengembangan Manajemen ASN BKD Provinsi Jawa Barat



A. Tantangan

Tantangan (Threat) bagi organisasi adalah faktor lingkungan (baik internal maupun eksternal) yang tidak menguntungkan dan berpotensi mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan gambar 2.5 ini dijabarkan tantangan pengembangan pelayanan kepegawaian sebagai berikut :

1. **Sistem Informasi Layanan Kepegawaian** integrasi data SIASN BKN dengan Aplikasi Data Kepegawaian SIAP Jabar, kondisi existing saat ini dalam sistem informasi kepegawaian masih kesulitan menerapkan otentikasi dan parameter yang digunakan oleh API SIASN BKN agar komunikasi data kepegawaian dapat bersifat 2 (dua) arah (duplex), selain itu keamanan data pegawai merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dimana data yang disimpan dalam SIAP Jabar harus dijaga keamanannya agar tidak disalahgunakan atau dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, belakangan ini sering terjadi pemberitaan kebocoran data yang disebabkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hasil audit internal yang diadakan tim SANDIKAMI Diskominfo Provinsi Jawa Barat keamanan data di SIAP Jabar masih belum layak. Sejalan dengan hal tersebut sebagai percepatan sistem informasi layanan kepegawaian percepatan dan peningkatannya integrasi SIAP Jabar dan SIASN merupakan isu strategis dimana

untuk peningkatan pelayanan kepegawaian khususnya kenaikan pangkat setiap usulan kenaikan pangkat pegawai Provinsi Jawa Barat kurang lebih berjumlah 4000an setiap tahunnya, dan setiap periode Badan Kepegawaian Negara memberikan batas waktu pengusulan kenaikan pangkat yang pada akhirnya tim pangkat melakukan percepatan usulan kenaikan pangkat agar seluruh usulan pegawai provinsi dapat teruskan seluruhnya dapat diterbitkan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkatnya tepat waktu dan tepat gaji, namun pada prosesnya terdapat kendala yang berakibat menghambat pengusulan kenaikan pangkat, diantaranya :

- keterlambatan pengusulan dari perangkat daerah;
- persyaratan kenaikan pangkat yang belum memenuhi syarat.

2. **Penyempurnaan Merit System** dan pola karir memberi kesempatan bagi PNS untuk menduduki jabatan berdasarkan potensi, kompetensi, dan kinerja. dengan telah terbentuk dan berjalannya pola manajemen talenta dalam manajemen ASN di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan dipayungi beberapa regulasi yang mengatur tentang masing-masing urusan pada setiap unsur manajemen talenta yang sudah ditetapkan baru melalui peraturan kepala daerah yang secara keberlangsungan, pengembangan dan penguatan payung/dasar hukum masih belum dinaungi aturan daerah yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil penilaian penerapan sistem merit dalam manajemen ASN pada Tahun 2022, masih terdapat KESENJANGAN nilai pada beberapa sub aspek khususnya pada aspek pengembangan karir, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat baru mendapatkan nilai 120 dari 130 nilai maksimal;
3. **Reformasi Birokrasi Tematik** yang berimbas kepada Transformasi Birokrasi yang berimbas dan berdampak pada penyederhanaan Nomenklatur jabatan pelaksanaan (Permenpan RB 45 Tahun 2022) dan Peningkatan Indeks *Core Value* berAKHLAK. untuk mendukung transformasi birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional di lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan kebijakan terkait dengan nomenklatur jabatan pelaksana menggantikan kebijakan lama yang dinilai sudah tidak relevan dan selaras dengan struktur yang baru sejalan dengan hal tersebut *Core Value* berAKHLAK menunjukkan Hasil Survey Indeks core value berAKHLAK untuk di Jawa Barat masih cukup sehat dengan capaian 60,2%. Dari 7 aspek yang idealnya berwarna hijau, 6 diantaranya berwarna kuning dan 1

berwarna orange.;

4. **Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN** menuntut pemenuhan kebutuhan kualifikasi dan kompetensi pegawai dengan jumlah yang sangat banyak;
5. **Assessment Center** merupakan metode untuk pemetaan menggali kompetensi perilaku sehingga dapat ditemukan di area kekuatan maupun kompetensi yang perlu dikembangkan oleh individu melalui sejumlah simulasi. Simulasi-simulasi yang diberikan bertujuan untuk mengukur kompetensi yang dibutuhkan maupun menjadi tuntutan individu dalam menjalankan peran dan tugasnya saat ini maupun menjadi tuntutan individu dalam menjalankan peran dan tugasnya saat ini maupun yang akan datang, simulasi yang diberikan dirancang khusus mampu memberikan gambaran maupun menyerupai kondisi kerja individu sehari-hari penilaian terhadap kompetensi seseorang juga dapat diukur secara kuat melalui metode *multiraters*. Melalui simulasi-simulasi yang diberikan, individu diminta untuk dapat menjalankan sejumlah tugas maupun peran, antara lain mengidentifikasi masalah, melakukan pengambilan keputusan, bekerja di dalam kelompok dan sebagainya;
6. **Disiplin ASN** dimana meningkatnya kasus pelanggaran disiplin yang terkait pelanggaran moral. Tantangan dan peluang dalam Manajemen ASN yang dihadapi dari waktu ke waktu mengalami perubahan seiring dengan adanya perubahan baik lingkungan, tata ruang, perilaku dan ekonomi. Hal ini berdampak pada tuntutan sosok pegawai negeri sipil yang visioner dan profesional serta dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan dan pembangunan.

B. Peluang

Analisis terhadap lingkungan eksternal dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung Manajemen ASN yang dilaksanakan oleh BKD Provinsi Jawa Barat dalam masa transisi kepala daerah. Adapun peluang kedepan dalam Manajemen ASN adalah sebagai berikut.

Gambar 2.6
Peluang Pengembangan Manajemen ASN BKD Provinsi Jawa Barat



1. Transformasi Digital

Transformasi digital Pemerintahan merupakan upaya untuk mengembangkan implementasi layanan *E-Government* dengan menggunakan Teknologi Informasi. Peningkatan pelayanan publik dan peningkatan manajemen ASN sejatinya berjalan dengan sistem online agar dalam pelaksanaan evaluasi dan monitor dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran.

Sejalan dengan hal tersebut sistem informasi layanan kepegawaian merupakan hal utama yang menjadi pembangunan dan pembenahan dalam transformasi digital, dimana data data kepegawain harus sudah terintegrasi antara SIAP Jabar dan SIAN BKD, hal ini bertujuan untuk memudahkan pemantauan dan peningkatan pelayanan kepegawaian sehingga seluruh layanan kepegawaian di Provinsi Jawa Barat dan ditingkatkan sebagai upaya percepatan layanan kepegawaian.

Dalam peningkatan manajemen ASN transformasi digital merupakan indikator utama penerapan sistem merit dimana di era Industri 4.0 dalam Manajemen ASN sudah harus menggunakan Aplikasi yang menunjang dalam pelaksanaan Manajemen ASN. Aplikasi tersebut akan mempermudah dalam proses manajemen dalam Mutasi dan Promosi, pengembangan Pola Karir PNS melalui Fit And Proper Test agar Profil Kompetensi Teknis pegawai sebagai dasar penyelenggaraan pengembangan Kompetensi yang lebih efektif.

Untuk pemenuhan Indeks Profesionalitas ASN bantuan Transformasi Digital di bidang Peningkatan Kompetensi ASN dapat memudahkan dalam pembelajaran ASN

untuk mendapatkan Pengembangan Kompetensi Minimal 24 JP dalam 1 (satu) tahun dengan membuat modul pembelajaran yang dibuat secara online agar tugas dan fungsi PNS masih bisa tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Reformasi Birokrasi Transformasi Digital merupakan komponen penunjang utama dalam melakukan perubahan dalam sektor vital pemerintahan yang dapat membantu dalam pengukuran indeks kenaikannya, sehingga target yang di inginkan dapat tercapai dengan baik.

2. Manajemen ASN berdasarkan PermenPAN & RB Nomor 3 Tahun 2020

Manajemen Talenta ASN Nasional adalah sistem manajemen karier ASN yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pemerintah secara nasional dalam rangka akselerasi pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya Manajemen ASN bertujuan membuat alur pengembangan Karir ASN yang mengacu kepada Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis dan Kompetensi Sosiokultural.

Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN diharapkan dapat meningkatkan kualitas Manajemen ASN sehingga dalam tahapan akuisisi, pengembangan, retensi dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan instansi pusat dan instansi daerah.

Pencapaian hasil sistem merit pemerintah provinsi Jawa Barat tahun 2022 lalu menunjukkan bahwa penerapan manajemen talenta ASN di Jawa Barat telah berjalan sebagaimana mestinya, dengan pembangunan *Assesment Center* diharapkan peningkatan kompetensi ASN di pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Jawa Barat.

Dengan memperhatikan evaluasi kinerja tahun 2024, hasil Forum Perangkat Daerah bidang kepegawaian tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, maka isu strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sistem Merit

Presiden Republik Indonesia menetapkan 5 prioritas kerja nasional Tahun 2020-2024 yang salah satunya yaitu “Pembangunan SDM” untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Salah satu upaya BKD Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan sumber daya manusia yaitu dengan memperkuat implementasi manajemen ASN berbasis sistem merit. Hal tersebut tertuang sebagai Indikator dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Pada Tahun 2024 Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Barat selaku penanggungjawab Penerapan Sistem Merit di Provinsi Jawa Barat telah mengikuti penilaian Penerapan Sistem Merit yang dilaksanakan oleh KASN Dalam penilaian tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan nilai sebesar 400 poin atau berada pada kategori IV dengan indikator berwarna biru, menunjukkan bahwa instansi dinilai “sangat baik”. Instansi dalam kategori tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar persyaratan sudah dipenuhi dan sudah dapat diizinkan untuk menjalankan seleksi terbatas di instansinya melalui talent pool dan dievaluasi setiap 2 tahun. Capaian tersebut sudah mencapai target sebesar 400 poin yang ditetapkan pada tahun 2024. Namun masih terdapat kesenjangan nilai pada beberapa sub aspek khususnya pada aspek pengembangan karir.

2. Shadow Target

Adanya Shadow Target salah satu aspek dalam target reformasi tematik bahwa perangkat daerah khususnya Badan Kepegawaian provinsi jawa barat diberikan tugas mengasistensi kab/kota dan badan kepegawaian daerah provinsi jawa barat bertanggung jawab untuk membantu kota Cirebon untuk meningkatkan/ menurunkan capaian Stunting, Pengangguran, kemiskinan, inflasi dan ketahanan pangan, yang dilaporkan berkala kepada Biro Bumd,

Investasi dan administrasi pembangunan setiap bulannya selaku LO wilayah IV pendampingan indikator makro pembangunan .

3. Sistem Informasi Layanan Kepegawaian

Dalam mendukung pelaksanaan sistem merit di Provinsi Jawa Barat, diperlukan adanya digitalisasi sistem informasi layanan kepegawaian yang bertujuan agar pelayanan yang diberikan lebih cepat, efektif, efisien serta dapat menghemat anggaran yang akan dikeluarkan kemudian hari. Digitalisasi layanan kepegawaian juga membuat kinerja lebih terukur, target kinerja jelas, tunjangan adil, memudahkan pekerjaan karena terikat tempat dan waktu, merubah budaya kerja dan data yang dihasilkan akan lebih komprehensif.

Pada awal tahun 2024 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat telah meluncurkan aplikasi *Super Apps* Kepegawaian yaitu Jabar Smart ASN yang merupakan gabungan berbagai aplikasi kepegawaian yang ada di Provinsi Jawa Barat. Namun masih terdapat aplikasi layanan kepegawaian yang belum terdigitalisasi dengan Jabar Smart ASN. Selain itu, keamanan data-data yang disimpan dalam aplikasi layanan kepegawaian masih belum optimal yang dapat menyebabkan data bisa dicuri atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

4. Reformasi Birokrasi General

Arahan Presiden tentang Reformasi Birokrasi bahwa birokrasi bukan tumpukan kertas, birokrasi harus lincah dan cepat agar berdampak dan langsung dirasakan masyarakat. Reformasi Birokrasi dalam manajemen SDM saat ini sedang beralih dari *performance based bureaucracy*, birokrasi berbasis aturan menjadi birokrasi berbasis *dynamic governance* yaitu pengembangan potensi *human capital*, ASN tak tersekat agar mampu menyesuaikan dengan perubahan yang cepat.

Dalam mendukung transformasi birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional di lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Permenpan RB 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah. Kebijakan ini terkait dengan nomenklatur jabatan pelaksana menggantikan kebijakan lama yang dinilai sudah tidak relevan dan

selaras dengan struktur yang baru.

5. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN bertujuan memberikan standar bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan penilaian profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Pada Tahun 2023, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat mendapatkan penilaian IP ASN sebesar 54,25 poin. Dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai tugas pokok dan fungsinya mengemban 3 dimensi diantaranya, 1) Dimensi Kualifikasi; 2) Dimensi Kinerja; dan 3) Dimensi Disiplin, sementara untuk dimensi Kompetensi menjadi tugasnya dan tanggungjawab BPSDM.

6. Pembinaan Disiplin ASN

Dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan untuk menumbuhkan sikap disiplin PNS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka PNS wajib mematuhi disiplin PNS dan setiap Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah segera melakukan proses pemetaan (*mapping*) terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dengan program dan kegiatan dan sub kegiatan untuk kemudian dilakukan perubahan dengan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah, maka daripada itu BKD Provinsi Jawa Barat melakukan pemetaan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang berada dalam Renstra BKD 2024-2026 agar sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, serta berdasarkan telaahan yang telah dilakukan berikut lebih rinci hasil review terhadap Rancangan Awal RKPDP Tahun 2024 Provinsi Jawa Barat yang terlampir pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Review Terhadap RKPDP Tahun 2024
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

RKPDP 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Kode Rekening					Kegiatan	Anggaran Murni (Rp.)	Anggaran Pergeseran (Rp.)	Anggaran Perubahan (Rp.)	Keterangan
5									
5	3				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN	81.413.500.362,00	81.413.500.362,00	79.309.868.935,10	
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	60.733.515.127,00	60.733.515.127,00	62.387.268.289,00	
5	3	1	1,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	550.291.400,00	550.291.400,00	547.153.400,00	
5	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	415.957.200,00	415.957.200,00	412.819.200,00	
5	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	134.334.200,00	134.334.200,00	134.334.200,00	
5	3	1	1,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44.712.208.702,00	44.712.208.702,00	46.337.408.875,00	
5	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	44.495.678.276,00	44.495.678.276,00	46.120.878.449,00	
5	03	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	216.530.426,00	216.530.426,00	216.530.426,00	
5	3	1	1,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	197.760.000,00	197.760.000,00	70.459.620,00	
5	03	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	90.860.000,00	90.860.000,00	-	
5	03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	106.900.000,00	106.900.000,00	70.459.620,00	
5	3	1	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.621.090.439,00	2.621.090.439,00	2.421.513.528,00	
5	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	482.179.425,00	482.179.425,00	482.140.025,00	
5	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	235.265.000,00	235.265.000,00	247.422.500,00	
5	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	123.000.000,00	123.000.000,00	123.000.000,00	
5	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.780.646.014,00	1.780.646.014,00	1.568.951.003,00	
5	3	1	1,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.081.660.376,00	1.081.660.376,00	1.254.337.431,00	
5	03	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.081.660.376,00	1.081.660.376,00	1.254.337.431,00	
5	03	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-	
5	3	1	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.871.123.940,00	4.871.123.940,00	4.972.580.465,00	
5	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	639.649.218,00	639.649.218,00	639.649.218,00	
5	03	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93.800.000,00	93.800.000,00	129.440.000,00	

Kode Rekening					Kegiatan	Anggaran Murni (Rp.)	Anggaran Pergeseran (Rp.)	Anggaran Perubahan (Rp.)	Keterangan
5	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.137.674.722,00	4.137.674.722,00	4.203.491.247,00	
5	3	1	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.699.380.270,00	6.699.380.270,00	6.783.814.970,00	
5	03	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	900.061.000,00	900.061.000,00	900.061.000,00	
5	03	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.799.319.270,00	5.799.319.270,00	5.883.753.970,00	
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	20.679.985.235,00	20.679.985.235,00	16.922.600.646,10	
5	3	2	1,01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	11.216.905.316,00	11.216.905.316,00	8.816.945.470,10	
5	03	02	1.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	6.441.158.000,00	6.441.158.000,00	4.206.194.501,00	
5	03	02	1.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	245.078.000,00	245.078.000,00	171.910.700,00	
5	03	02	1.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	612.939.062,00	612.939.062,00	759.594.804,00	
5	03	02	1.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	3.821.289.100,00	3.821.289.100,00	3.596.608.715,00	
5	03	02	1.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	96.441.154,00	96.441.154,00	82.636.750,10	
5	3	2	1,02		Mutasi dan Promosi ASN	1.627.745.640,00	1.627.745.640,00	1.410.321.581,00	
5	03	02	1.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	530.067.291,00	530.067.291,00	452.987.197,00	
5	03	02	1.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	492.256.393,00	492.256.393,00	454.600.484,00	
5	03	02	1.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	605.421.956,00	605.421.956,00	502.733.900,00	
5	3	2	1,03		Pengembangan Kompetensi ASN	5.447.976.228,00	5.447.976.228,00	4.460.184.759,00	
5	03	02	1.03	02	Pengelolaan Assessment Center	554.530.400,00	554.530.400,00	405.251.400,00	
5	03	02	1.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	2.733.166.200,00	2.733.166.200,00	2.262.271.400,00	
5	03	02	1.03	05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	244.842.000,00	244.842.000,00	133.272.000,00	
5	03	02	1.03	06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	161.319.000,00	161.319.000,00	178.890.000,00	
5	03	02	1.03	09	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	476.357.800,00	476.357.800,00	439.470.070,00	
5	03	02	1.03	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	460.921.600,00	460.921.600,00	299.997.391,00	
5	03	02	1.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	132.344.837,00	132.344.837,00	50.469.727,00	

Kode Rekening					Kegiatan	Anggaran Murni (Rp.)	Anggaran Pergeseran (Rp.)	Anggaran Perubahan (Rp.)	Keterangan
5	03	02	1.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	137.093.806,00	137.093.806,00	87.876.557,00	
5	03	02	1.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	485.462.382,00	485.462.382,00	575.691.382,00	
5	03	02	1.03	15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	61.938.203,00	61.938.203,00	26.994.832,00	
5	3	2	1,04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2.387.358.051,00	2.387.358.051,00	2.235.148.836,00	
5	03	02	1.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	758.254.000,00	758.254.000,00	699.236.500,00	
5	03	02	1.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	1.194.702.804,00	1.194.702.804,00	1.149.684.079,00	
5	03	02	1.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	98.904.886,00	98.904.886,00	79.908.386,00	
5	03	02	1.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	302.869.099,00	302.869.099,00	278.576.459,00	
5	03	02	1.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	32.627.262,00	32.627.262,00	27.743.412,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Tidak ada program dan kegiatan BKD yang diusulkan pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/kota untuk tahun anggaran 2024.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH BKD PROV JABAR

3.1 Program, Kegiatan BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat serta mengacu kepada rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2024, maka dirumuskan program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 adalah :

- 1) Program Kepegawaian Daerah
- 2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;

Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan Program dan Kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala BKD Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk ketercapaian IKU Pemerintah Daerah, Dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan BKD Provinsi Jawa Barat sampai dengan triwulan II Tahun 2024 serta memperhatikan Perubahan RKPD Tahun 2024 terdapat 2 Program, 11 Kegiatan, 39 Sub Kegiatan dengan Total Pagu Perubahan Total Rp. 81.413.500.362,-menjadi 79.309.868.835,- disajikan pada tabel terlampir Tabel 3.1.

TABEL 3.1
PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SASARAN KEGIATAN			Rencana Perubahan Tahun 2024			Ket
		Indikator			Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/(Kurang)	
		Indikator Kinerja program/Kegiatan	Target	Lokasi Kegiatan				
1	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
2	KEPEGAWAIAN				81.413.500.362,00	79.309.868.935,10	(2.249.690.726,90)	
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84 Kategori A Kategori		60.733.515.127,00	62.387.268.289,00	1.527.993.862,00	
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	100 Persen		550.291.400,00	547.153.400,00	(3.138.000,00)	
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	415.957.200,00	412.819.200,00	(3.138.000,00)	
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	134.334.200,00	134.334.200,00	-	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SASARAN KEGIATAN			Rencana Perubahan Tahun 2024			Ket
		Indikator			Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/(Kurang)	
		Indikator Kinerja program/Kegiatan	Target	Lokasi Kegiatan				
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	100 Persen		44.712.208.702,00	46.337.408.875,00	1.625.200.173,00	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	138 Orang/ Bulan	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	44.495.678.276,00	46.120.878.449,00	1.625.200.173,00	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKP	15 Laporan	Kota Bandung, Bandung	216.530.426,00	216.530.426,00	-	
10	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang	100 Persen		197.760.000,00	70.459.620,00	(127.300.380,00)	
11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	138 Paket	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	90.860.000,00	-	(90.860.000,00)	
12	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	106.900.000,00	70.459.620,00	(36.440.380,00)	
13	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Sesuai Ketentuan	100 Persen		2.621.090.439,00	2.421.513.528,00	(199.576.911,00)	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SASARAN KEGIATAN			Rencana Perubahan Tahun 2024			Ket
		Indikator			Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/(Kurang)	
		Indikator Kinerja program/Kegiatan	Target	Lokasi Kegiatan				
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	482.179.425,00	482.140.025,00	(39.400,00)	
15	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	235.265.000,00	247.422.500,00	12.157.500,00	
16	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	123.000.000,00	123.000.000,00	-	
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	1.780.646.014,00	1.568.951.003,00	(211.695.011,00)	
18	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang	100 Persen		1.081.660.376,00	1.254.337.431,00	46.917.755,00	
19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Bandung, Bandung Wetan,	1.081.660.376,00	1.254.337.431,00	46.917.755,00	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SASARAN KEGIATAN			Rencana Perubahan Tahun 2024			Ket
		Indikator			Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/(Kurang)	
		Indikator Kinerja program/Kegiatan	Target	Lokasi Kegiatan				
20	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum		-	-	
21	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen		4.871.123.940,00	4.972.580.465,00	101.456.525,00	
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Bandung	639.649.218,00	639.649.218,00	-	
23	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Bandung, Bandung Wetan,	93.800.000,00	129.440.000,00	35.640.000,00	
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	12 Laporan	Kota Bandung, Bandung Wetan,	4.137.674.722,00	4.203.491.247,00	65.816.525,00	
25	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 Persen		6.699.380.270,00	6.783.814.970,00	84.434.700,00	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SASARAN KEGIATAN			Rencana Perubahan Tahun 2024			Ket
		Indikator			Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/(Kurang)	
		Indikator Kinerja program/Kegiatan	Target	Lokasi Kegiatan				
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibavarkan Paiak dan	15 Unit	Kota Bandung, Bandung Wetan,	900.061.000,00	900.061.000,00	-	
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	Kota Bandung, Bandung Wetan,	5.799.319.270,00	5.883.753.970,00	84.434.700,00	
28	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Kriteria Manajemen Kinerja dan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin Nilai Kriteria Pengembangan Karier Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Perlindungan Dan Pelayanan; Dan Sistem Informasi Kepegawaian Nilai Kriteria Promosi dan Mutasi Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Disiplin Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kinerja Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi	120 Poin 120 Poin 117,5 Poin 40 Poin 4,9 Poin 27,5 Poin 12,5 Poin		20.679.985.235,00	16.922.600.646,10	(3.777.684.588,90)	
29	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Perlindungan dan Pelayanan;	117,5 Poin		11.216.905.316,00	8.816.945.470,10	(2.399.959.845,90)	
30	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	Kota Bandung, Bandung	6.441.158.000,00	4.206.194.501,00	(2.234.963.499,00)	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SASARAN KEGIATAN			Rencana Perubahan Tahun 2024			Ket
		Indikator			Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/(Kurang)	
		Indikator Kinerja program/Kegiatan	Target	Lokasi Kegiatan				
31	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi	4 Dokumen	Kota Bandung, Bandung	245.078.000,00	171.910.700,00	(73.167.300,00)	
32	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	3 Lembaga	Kota Bandung, Bandung	612.939.062,00	759.594.804,00	146.655.742,00	
33	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Bandung, Bandung	3.821.289.100,00	3.596.608.715,00	(224.680.385,00)	
34	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Bandung, Bandung, Wetan, Citarum	96.441.154,00	82.636.750,10	(13.804.403,90)	
35	Mutasi dan Promosi ASN	Nilai Kriteria Promosi dan Mutasi	40 Poin		1.627.745.640,00	1.410.321.581,00	(217.424.059,00)	
36	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	1 Dokumen	Kota Bandung, Bandung, Wetan, Citarum	530.067.291,00	452.987.197,00	(77.080.094,00)	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SASARAN KEGIATAN			Rencana Perubahan Tahun 2024			Ket
		Indikator			Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/(Kurang)	
		Indikator Kinerja program/Kegiatan	Target	Lokasi Kegiatan				
37	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	8 Laporan	Kota Bandung, Bandung, Wetan, Citarum	492.256.393,00	454.600.484,00	(37.655.909,00)	
38	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	6 Dokumen	Kota Bandung, Bandung, Wetan, Citarum	605.421.956,00	502.733.900,00	(102.688.056,00)	
39	Pengembangan Kompetensi ASN	Nilai Kriteria Pengembangan Karier	120 Poin		5.447.976.228,00	4.460.184.759,00	(1.008.091.469,00)	
40	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	11 Dokumen	Kota Bandung, Bandung, Wetan, Citarum	554.530.400,00	405.251.400,00	(169.579.000,00)	
41	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	4 Dokumen	Kota Bandung, Bandung, Wetan, Citarum	2.733.166.200,00	2.262.271.400,00	(470.894.800,00)	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SASARAN KEGIATAN			Rencana Perubahan Tahun 2024			Ket
		Indikator			Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/(Kurang)	
		Indikator Kinerja program/Kegiatan	Target	Lokasi Kegiatan				
42	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	4 Dokumen	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	244.842.000,00	133.272.000,00	(111.570.000,00)	
43	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	100 Orang	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	161.319.000,00	178.890.000,00	17.571.000,00	
44	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	6 Dokumen	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	476.357.800,00	439.470.070,00	(36.887.730,00)	
45	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	50 Orang	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	460.921.600,00	299.997.391,00	(160.924.209,00)	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SASARAN KEGIATAN			Rencana Perubahan Tahun 2024			Ket
		Indikator			Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/(Kurang)	
		Indikator Kinerja program/Kegiatan	Target	Lokasi Kegiatan				
46	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	2 Laporan		132.344.837,00	50.469.727,00	(81.875.110,00)	
47	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	20000 Orang		137.093.806,00	87.876.557,00	(49.217.249,00)	
48	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	8 Dokumen	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	485.462.382,00	575.691.382,00	90.229.000,00	
49	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan	2 Laporan		61.938.203,00	26.994.832,00	(34.943.371,00)	
50	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Nilai Kriteria Manajemen Kinerja dan Penggajian,	120 Poin		2.387.358.051,00	2.235.148.836,00	(152.209.215,00)	
51	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8 Dokumen	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	758.254.000,00	699.236.500,00	(59.017.500,00)	
52	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	15 Orang	Kota Bandung,	1.194.702.804,00	1.149.684.079,00	(45.018.725,00)	
53	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	500 Orang	Kota Bandung,	98.904.886,00	79.908.386,00	(18.996.500,00)	
54	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan	500 Orang	Kota Bandung,	302.869.099,00	278.576.459,00	(24.292.640,00)	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SASARAN KEGIATAN			Rencana Perubahan Tahun 2024			Ket
		Indikator			Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/(Kurang)	
		Indikator Kinerja program/Kegiatan	Target	Lokasi Kegiatan				
55	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	10 Dokumen	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	32.627.262,00	27.743.412,00	(4.883.850,00)	
					81.413.500.362,00	79.309.868.935,10	(2.249.690.726,90)	

Berdasarkan tabel 3.1 jika dilihat dari penyerapan anggaran tahun 2024 telah mencapai 42,63% dari pagu anggaran pergeseran sebesar Rp. 81.413.500.362 dengan sisa anggaran Rp. 46.707.215.654. Adapun rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program adalah 37,38% untuk realisasi kinerja output, dan 30,13% untuk capaian relisasi kinerja anggaran sehingga predikat kinerja yang dicapai untuk Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II adalah “Sangat Rendah”.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah diuraikan sebelumnya disusun berdasarkan pendekatan kinerja dalam rangka pencapaian target kinerja yang tertuang dalam IKU Gubernur dan IKU Perangkat Daerah. Adapun lebih jelasnya keterkaitan kinerja antara program dan kegiatan tersebut dapat dilihat dalam lampiran Rencana Program Kerja, Indikator dan Target dalam Rencana Kerja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

3.2 Sinkronisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Dari program dan kegiatan yang telah disebutkan sebelumnya, BKD Provinsi Jawa Barat sendiri tidak lepas kerjasamanya dengan perangkat daerah lain dalam mewujudkan target kinerjanya. Utamanya karena implementasi Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang berpengaruh terhadap susunan OPD, susunanpejabat struktural dan susunan tupoksi masing-masing perangkat daerah. Lebih lanjut lagi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya BKD Provinsi Jawa batay perlu mengkaji nomenklatur dan formasi akan jabatan fungsional tertentu yang sehubungan SOTK baru dalam lingkup Provinsi. Jawa Barat dan Peraturan Menteri PAN-RB No. 25 tahun 2016 tentang Nomenklatur bagi Jabatan Pelaksana mendapatkan penyesuaian baik secara nomenklatur maupun formasi.

BKD sebagai *leading sector* dalam penentuan Jabatan bagi masing-masing individu yang bertugas dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus betul-betul *realible* dan *sustainable*. Artinya yang sesuai dengan kenyataan (dapat dipertanggungjawabkan) dan berkelanjutan. Selain itu, perubahan dalam pengelolaan ASN yang semakin dinamis dijawab dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 mengenai Manajemen ASN

yang didalamnya terdapat perubahan- perubahan yang arahnya adalah menuju perubahan yang cepat dan tanggap dari para seluruh aparatur khususnya lingkup Provinsi Jawa Barat.

Selain itu beberapa catatan yang menjadi fokus perhatian dalam pelaksanaan kegiatan BKD pada tahun anggaran 2024 melibatkan beberapa perangkat daerah sebagai rekan kerjasama dalam upaya mewujudkan indikator sasaran yang sama dalam RPD 2024-2026, diantaranya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat, kaitannya dengan penyelenggaraan berbagai diklat teknis maupun fungsional serta diklat kepemimpinan. Selain itu, BKD juga tidak terlepas kerjasamanya dengan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam kaitannya dengan pelaksanaan analisis jabatan (ANJAB) dan analisis beban kerja (ABK), pemantapan tugas pokok dan fungsi organisasi, serta penetapan besaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).

BKD juga merupakan *leader* untuk beberapa kegiatan penting yang melibatkan seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, diantaranya kegiatan pengukuran kinerja pegawai yang kemudian diaplikasikan dalam suatu sistem sasaran kerja pegawai yang telah terintegrasi secara *online*. Dalam hal ini setiap pegawai bertanggungjawab untuk menginput realisasi dari target sasaran kerja yang telah ditetapkan pada awal tahun berjalan. Tahap akhir dari proses penilaian kinerja tersebut ada di BKD selaku verifikator kinerja dari masing-masing pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dalam pelaksanaannya, masing-masing perangkat daerah memiliki peranan penting untuk selalu mendorong para pegawainya menginput realisasi kinerja tepat waktu. Ditambah lagi dengan adanya beban tenaga pendidik dan kependidikan yang sejauh ini sudah mulai melaksanakan tugasnya sebagai pegawai lingkup Provinsi Jawa Barat yang artinya penilaian kinerja dan permasalahan kesejahteraan sudah sepenuhnya di tanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

BKD memiliki tanggungjawab besar dalam mewujudkan target yang telah ditetapkan pada tahun 2026. BKD dalam kegiatan Pengembangan Sumber

Daya Aparatur memasukan program pendampingan serta sosialisasi guna memotivasi para ASN untuk tetap semangat dalam meraih beasiswa jenjang S3 ke luar negeri.

BAB IV PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 merupakan perencanaan kerja untuk periode Tahun 2024. Rencana Kerja (Renja) Perubahan merupakan penjabaran dari Renstra BKD Tahun 2018-2023 dan 2024-2026 dengan mempedomani isu-isu penting tahun berjalan pada masa transisi Kepala Daerah. Serta sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan Program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

Sebagai Pedoman Kerja, pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024 ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Seluruh ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat wajib melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Anggaran Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Tahun 2024 mengacu kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024;
3. Pelaksanaan DPA Tahun 2024 akan di Monitoring dan Evaluasi setiap bulan dan di Laporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan;
4. Pada Akhir Tahun 2024 pelaksanaan Program dan Kegiatan akan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024 akan di evaluasi sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024.

Selanjutnya, Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 akan di jabarkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN